

ABSTRAK

Penelitian ini membahas latar belakang kegagalan implementasi kebijakan *UK-Rwanda Asylum Partnership* pada periode 2022-2024 sebagai salah satu bentuk kebijakan eksternalisasi migrasi yang diambil oleh pemerintah Inggris dalam merespons meningkatnya arus pencari suaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan perumusan kebijakan tersebut serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalannya, dengan memperhatikan peran aktor politik domestik, faktor hukum dan biaya dalam proses kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan resmi. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah konsep eksternalisasi migrasi untuk menjelaskan dinamika pemindahan proses suaka ke negara ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu lemahnya legitimasi hukum yang memicu berbagai gugatan dan hambatan yudisial, rendahnya dukungan politik domestik yang mempersempit ruang implementasi kebijakan, serta besarnya beban biaya yang dinilai tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan pada akhirnya mendorong penghentian kebijakan oleh pemerintah Inggris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan eksternalisasi migrasi tidak hanya bergantung kepada bagaimana kebijakan itu dirancang, tetapi juga pada seberapa kuat dasar hukumnya, dukungan politik, dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: eksternalisasi migrasi, kebijakan suaka, *UK-Rwanda Asylum Partnership*, legitimasi hukum, politik domestik

ABSTRACT

This study examines the background of failed implementation of the UK-Rwanda Asylum Partnership policy between 2022-2024, which represents a form of migration externalization adopted by the UK government in response to the rising number of asylum seekers. The research aims to identify the underlying reasons behind the formulation of the policy and to analyze the factors contributing to its failure, while also highlighting the role of both domestic and international actors in shaping the policy process. This study employs a qualitative approach using library research, relying on secondary data such as academic literature, international organization reports, and official policy documents. The analytical framework is based on the concept of migration externalization to explain the transfer of asylum processing to a third country. The findings reveal that the failure of the policy was driven by three main factors: weak legal legitimacy, which led to judicial challenges; limited domestic political support, which constrained policy implementation; and high financial cost, which were considered disproportionate to the outcomes. These factors interacted and ultimately led to the termination of the policy. The study concludes that the success of migration externalization policies does not depend solely on how the policy is designed, but also on the strength of its legal basis, the level of political support, and how efficiently the budget is managed in its implementation.

Keywords: *migration externalization, asylum policy, UK-Rwanda asylum partnership, legal legitimacy, domestic politics*